

Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Meysa Sita Irfani^{1*}, Diyah Probowulan², Didik Eko Pramono³

^{1,2,3} Universitas Muahammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 February 2019
Received in revised form
16 March 2019
Accepted 15 April 2019
Available online 26 May
2019

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah,
Efektivitas, Daya Pajak,
Kontribusi

Keywords:

Local Revenue,
Effectiveness, Tax Power,
Contributions

ABSTRAK

Jumlah Kendaraan Bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya berpengaruh terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Pajak adalah salah satu penerimaan pendapatan pemerintah yang penting dalam pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi program pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, di Kabupaten Bondowoso penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dijabarkan dengan metode deskriptif persentase, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pajak kendaraan bermotor, daya pajak dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif, daya pajak rendah dan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang sangat baik.

ABSTRACT

The number of vehicles that is increasing every year has an effect on tax revenues in Indonesia. tax is one of the important government revenues in regional development. Regional income sources include provincial taxes and district taxes which are expected to be a source of funding for regional development programs and the welfare of the community. One source of regional income from provincial taxes is the Motor Vehicle Tax, in Bondowoso Regency motor vehicle tax receipts make a large contribution to local revenue. This research is described by the descriptive method Percentage, the purpose of this study is to determine the effectiveness of motor vehicle tax, tax power and motor vehicle tax contributions to local revenue. The results showed that motor vehicle tax revenue was very effective, the tax power was low and the motor vehicle tax contribution was very good.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: meysasita69@gmail.com (Meysa Sita Irfani)

1. Pendahuluan

Dalam menghadapi arus globalisasi, pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara berkembang salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam zaman yang serba global peran pemerintah untuk melakukan pembangunan merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih baik dalam bidang ekonomi. Untuk melaksanakan pembangunan nasional diperlukan dana cukup besar yang digunakan sebagai modal dalam membiayai setiap pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Ketercapaian pembangunan nasional dapat terjadi jika semua pihak mendukung dan memberikan kontribusi penuh terhadap setiap program yang di buat oleh pemerintah guna mensukseskan Pembangunan Nasional. Salah satunya adalah keberhasilan pembangunan di setiap daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien. Kemampuan keuangan disuatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari setiap daerah yang ada di Indonesia.

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang letaknya di Kabupaten Bondowoso. Penerimaan pajak provinsi yang cukup menonjol di UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini adalah realisasi Penerimaan Kas untuk Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
	Rp	%
2013	30.385.871.355	-
2014	33.475.900.297	33
2015	37.590.071.980	37
2016	40.934.717.876	40
2017	45.871.603.546	45

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Berdasarkan data dari Tabel 1 diatas, terlihat bahwa setiap tahunnya total Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kas yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingka kenaikan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor keduanya mengalami peningkatan hanya saja terdapat perbedaan angka yang signifikan.

Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan dari hasil penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana Efektivitas Pajak Kendaraan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 2) Bagaimana Daya Pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 3) Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Darah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

Adapun tujuan penelitian yang penulis cantumkan dari penelitian sebagai berikut: 1) Untuk Mengetahui Efektivitas Pajak Kendaraan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 2) Untuk Mengetahui Daya Pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 3) Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

Berikut adalah pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah.

Warsito (2001) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Di Indonesia, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Tungka dan Sabijono (2005) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Adapun Kriteria Tax Effort sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria dari *Tax Effort*

Persentase	Kriteria
76% - 100%	Tinggi
51% - 75%	Sedang
26% - 50%	Rendah
0% - 25%	Sangat Rendah

Martoyo (1998) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu: 1) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif, 2) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif, 3) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Menurut T Guritno (1997) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Berikut ini adalah indikator dalam menilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3 Indikator menilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

2. Metode

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Deskriptif Persentase yaitu untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Maradalis, 2003).

Ada dua teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu: 1. Teknik wawancara, 2. Teknik dokumentasi, 3. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

$$(\text{Tarif PKB} \times \text{Harga Kendaraan Bermotor} \times \text{Jumlah Obyek})$$

2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

3. Daya Pajak (*Tax Effort*)

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{(\text{Penerimaan Pajak})_t}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Hasil dan pembahasan

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh UPT Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Dari semua perhitungan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh tahun 2013 sampai 2017 diketahui bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso selama lima tahun dikatakan sangat efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Tahun 2013-2017

Tahun	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (Persen)	Kriteria
2013	113	Sangat Efektif
2014	164	Sangat Efektif
2015	107	Sangat Efektif
2016	111	Sangat Efektif
2017	119	Sangat Efektif

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, data diolah

Faktor yang menyebabkan Sangat Efektif diantaranya adalah: a) Jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya juga mengalami kenaikan, b) Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama ini pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, c) Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam hal ini UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah Provinsi memberikan keringanan pajak yaitu penghapusan denda pajak, sehingga wajib pajak di Provinsi Jawa Timur Khususnya Kabupaten Bondowoso patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5. Perhitungan Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Tahun 2013-2017

Tahun	Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Persen	Kriteria
2013	25	Rendah
2014	25	Rendah
2015	25	Rendah
2016	26	Rendah
2017	26	Rendah

Sumber: Biro pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, terlihat pada Tabel 4.10 bahwa selama lima tahun, daya pajak mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuasi. Daya Pajak atau kemampuan membayar pajak mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kemudian mengalami kenaikan lagi tahun 2015 sampai tahun 2017. Daya Pajak atau kemampuan membayar pajak di Kabupaten Bondowoso tergolong rendah, hal ini ditunjukkan dengan persentase daya pajak terendah sebesar 25 persen dan tertinggi 26 persen. Berdasarkan hasil perhitungan daya pajak, mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak masih harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membayar pajak maka pemerintah daerah dapat dilakukan dengan membangun kestabilan ekonomi sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan bayar masyarakat disuatu daerah terutama di Kabupaten Bondowoso. Faktor – faktor yang menyebabkan kemampuan membayar pajak rendah berdasarkan wawancara dengan Bendahara DI UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso yaitu Bapak Didik Koeswanto adalah : 1) Kemiskinan, 2) Sanksi Yang Kurang Tegak, 3) Kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang masih kurang tentang pentingnya membayar pajak

Tabel 6. Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Tahun 2013-2017

Tahun	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Persen)	Kriteria
2013	53	Sangat Baik
2014	58	Sangat Baik
2015	63	Sangat Baik
2016	63	Sangat Baik
2017	64	Sangat Baik

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso tergolong sangat baik. Tahun 2013 sebesar 53 %, Tahun 2014 sebesar 58 %, Tahun 2015 sebesar 63 %, Tahun 2016 sebesar 63 %, Tahun 2017 sebesar 64 %, hal tersebut menunjukkan tren yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kontribusi. Penyebab kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah teralisasinya pemenuhan target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal Ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam hal UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso cukup baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi, dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor.

4. Simpulan dan saran

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis menganalisis Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor, Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, dari analisis data yang telah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari analisis ini terlihat bahwa target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso belum sesuai dengan potensi riil dari Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Hasil perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso sudah sangat efektif, 3) Hasil pengukuran Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan kemampuan masyarakat membayar pajak di kabupaten Bondowo rendah dan masih perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso selama periode Tahun 2013-2017 sangat baik berkisar 53 persen sampai 64 persen.

Daftar Rujukan

- Barat, P. A. D. P. S. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap.
- Eryandi, G., Alfansi, L., & Benardin, B. (2011). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Bengkulu. *Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 4(2), 37-44.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Malombeke, N. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Novella, E., & Baihaqi, B. Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerahkota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 33-50.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2004, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2009, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2009, No. 28. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Provinsi Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Surabaya
- Pemerintah Provinsi Daerah No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Pramesthi, PD, & Adnan, M. (2015). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2014 Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*, 4 (3), 301-310.
- Riady, I., SBM, N., & Nugroho, S. B. M. (2010). *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syahputra, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Medan Selatan.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Wokas, H. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi maluku utara. *ACCOUNTABILITY*, 3(1), 56-65.